



Eksodus Etnis Tionghoa dari Kudus ke Semarang Akibat Konflik antaretnis di Kudus 1918

Moh Abdul Rochim,^{1*} Ufi Saraswati¹

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: mohrohim@students.unnes.ac.id, ufiratri@mail.unnes.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 02-02-2026, Revised: 09-04-2026, Accepted: 11-04-2026, Published: 30-04-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konflik antaretnis di Kudus pada tahun 1918 yang berujung pada eksodus etnis Tionghoa ke Semarang. Fokus penelitian diarahkan pada faktor penyebab konflik, dinamika terjadinya kerusuhan, serta implikasi sosial ekonomi dari perpindahan tersebut. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer berupa surat kabar sezaman seperti *De Preanger Bode*, *De Indier*, *De Locomotief*, *Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage*, dan *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, serta didukung oleh literatur ilmiah sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh akumulasi ketegangan sosial ekonomi, segregasi sosial, serta sensitivitas identitas etnis dan keagamaan. Persaingan dalam sektor ekonomi strategis seperti industri kretek dan perdagangan memperkuat prasangka antarkelompok, yang kemudian dipicu oleh insiden simbolik dalam ruang publik. Kerusuhan yang terjadi pada 31 Oktober 1918 menyebabkan kerusakan besar, korban jiwa, serta ketidakamanan yang mendorong sebagian besar komunitas Tionghoa meninggalkan Kudus. Eksodus ke Semarang dipahami sebagai strategi rasional untuk memperoleh keamanan dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi melalui jaringan komunitas yang lebih kuat. Perpindahan ini juga menunjukkan bahwa migrasi dalam situasi konflik merupakan bentuk adaptasi sosial yang terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konflik komunal tidak hanya menghasilkan kekerasan fisik, tetapi juga mendorong perubahan demografis, sosial, dan ekonomi yang berdampak jangka panjang.

Kata Kunci:

eksodus; etnis Tionghoa; konflik antaretnis; Kudus

Abstract

This study examines the inter-ethnic conflict in Kudus in 1918, which led to the exodus of ethnic Chinese to Semarang. The research focuses on the factors causing the conflict, the dynamics of the riots, and the socio-economic implications of the migration. The research employs historical methods through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Primary sources include contemporary newspapers such as *De Preanger Bode*, *De Indier*, *De Locomotief*, *Dagblad van Zuid Holland en 's Gravenhage*, and *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie*, supported by secondary sources from scholarly literature. The results indicate that the conflict was not caused by a single factor, but by the accumulation of socio-economic tensions, social segregation, and sensitivities over ethnic and religious identities. Competition in strategic economic sectors such as the kretek (cigarette) industry and trade intensified intergroup prejudice, which was then fueled by symbolic incidents in the public sphere. The riots that occurred on October 31, 1918, caused extensive damage, loss of life, and insecurity, prompting much of the Chinese community to

leave Kudus. The exodus to Semarang is understood as a rational strategy to secure security and restore socio-economic life through stronger community networks. This movement also demonstrates that migration in conflict situations is a form of structured social adaptation. Thus, this study confirms that communal conflict not only results in physical violence but also drives demographic, social, and economic changes with long-term impacts.

Keywords:

Chinese; exodus; inter-ethnic conflict; Kudus



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Kudus pada awal abad ke 20 berkembang sebagai kota niaga yang ramai. Pertumbuhan perdagangan dan industri lokal seperti Rokok kretek dan Batik menjadikan Kudus sebagai ruang pertemuan banyak kelompok sosial. Kudus pada saat itu mempunyai komunitas Muslim Jawa dan komunitas Tionghoa yang sama-sama terlibat dalam aktivitas ekonomi. Hubungan antar kelompok etnis tersebut tidak selalu berjalan selaras. Liliweri dalam bukunya menunjukkan bahwa jarak sosial, prasangka, serta pola pemukiman yang cenderung terpisah ikut membentuk kerentanan hubungan antar etnis, terlebih ketika dipengaruhi oleh tata kelola kolonial yang memecah masyarakat ke dalam kategori kategori sosial tertentu (Liliweri, 2018).

Persaingan ekonomi dalam dinamika seperti itu dapat berubah menjadi ketegangan sosial. karena Kudus memiliki sektor usaha yang strategis dan menguntungkan sehingga mendorong kompetisi antar pedagang dan antar pengusaha. Persaingan pada bidang Kretek dan Batik ikut memperkuat prasangka dan stereotip negatif antar kelompok, karena perebutan peluang ekonomi sering dimaknai sebagai ancaman terhadap kedudukan sosial. Ketika ketegangan ekonomi bertemu dengan batas-batas identitas etnis dan agama, konflik menjadi lebih mudah tersulut, terutama bila muncul pemicu yang menyentuh simbol-simbol sosial dan keagamaan yang sensitif (Hana, 2018).

Puncak konflik terjadi pada akhir Oktober 1918, tepatnya pada 31 Oktober 1918 terjadi kerusuhan yang menasar komunitas Tionghoa di Kudus. Berita koran *De Locomotief* yang diterbitkan 3 November 1918, seorang koresponden menulis kepada redaksi bahwa kota kecil itu yang ketenangannya pada 31 Oktober sebelumnya terganggu secara brutal oleh peristiwa perampokan, pembunuhan, dan pembakaran, perlahan mulai kembali seperti sediakala, tetapi pemulihan itu lebih tampak sebagai kepura-puraan daripada kenyataan. *De Locomotief* menguraikan dalam beritanya bahwa orang-orang mulai kembali berlalu lalang dan beberapa toko tidak lagi menutup jendela hijaunya, sehingga orang asing yang melintas mungkin mengira tidak ada hal luar biasa, padahal keadaan yang sesungguhnya masih jauh berbeda.

Kawasan pecinan dalam peristiwa tersebut mengalami pembakaran dan penjarahan, yang mengakibatkan muncul korban jiwa dan luka-luka, situasi keamanan yang tidak menentu pada saat itu. Salah satu kajian menjelaskan bahwa kerusuhan ini berawal dari ketegangan yang meningkat sehari sebelumnya, lalu berkembang menjadi kekerasan massal yang mendorong warga Tionghoa untuk

menyelamatkan diri ke luar kota. Pemberitaan koran-koran juga menekankan besarnya kerusakan serta pelarian dalam jumlah besar menuju Semarang.

Konteks Budaya dan Keagamaan juga hadir dalam penjelasan peristiwa tersebut, selain faktor persaingan ekonomi. Tan Boe Kim dalam sebuah karyanya yang berjudul *Peroesoehan di Koedoes: soeatoe tjerita jang betoel telah terdjadi di Djawa Tenga pada waktoe jang belon sabrapa lama* menyebut adanya sembayangan dan perarakan *toapekkong*. Acara tersebut dimaknai sebagai upaya mencegah penyakit influenza yang telah mewabah di Kudus waktu itu. Proses pertama dan kedua acara ini berlangsung tanpa adanya gangguan, namun diproses acara berikutnya terjadi kerusuhan akibat perlakuan orang pribumi yang menertawakan acara *toapekkong*. Etnis Tionghoa yang sudah tersulut emosinya pun melawan balik penghinaan tersebut. Suasana sosial yang sudah tegang, serta pertemuan berbagai kepentingan menimbulkan kesalahpahaman yang memicu kemarahan kolektif. Kerusuhan yang terjadi diakibatkan dari persaingan ekonomi, segregasi sosial, dan sensitivitas identitas yang akhirnya meledak dalam kekerasan.

Dampak paling nyata dari kerusuhan ini adalah perpindahan penduduk dalam skala besar. Banyak warga Tionghoa meninggalkan Kudus untuk mencari keamanan. Salah satu rujukan menyatakan bahwa sekitar separuh populasi Tionghoa Kudus melarikan diri ke Semarang dan kota-kota lain di Jawa (Sin, 2005). Kajian lain juga menegaskan bahwa setelah kerusuhan, sebagian besar komunitas Tionghoa memilih pergi ke Semarang atau kota besar lain, sementara otoritas kolonial melakukan penangkapan dan pengamanan, dan media berbahasa Melayu memperdebatkan makna peristiwa tersebut di ruang publik (Adam et al., 2019). Dengan demikian, eksodus dari Kudus ke Semarang bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan respons terhadap ancaman kekerasan, rasa takut, dan kebutuhan untuk memulihkan kehidupan ekonomi serta sosial.

Semarang dipandang sebagai tujuan yang masuk akal karena kedudukannya sebagai pusat perdagangan dan administrasi di wilayah Jawa Tengah. Kota ini memiliki aktivitas pelabuhan, jaringan distribusi yang lebih luas, serta komunitas Tionghoa yang lebih besar sehingga memberikan peluang dukungan sosial dan kesempatan ekonomi bagi para pendatang (Mahmudah, 2018). Eksodus menuju Semarang juga dapat dibaca sebagai strategi bertahan hidup yaitu memanfaatkan jaringan kerabat, relasi dagang, dan komunitas untuk mendapatkan tempat tinggal sementara, pekerjaan, serta rasa aman. Dalam kerangka sejarah sosial, perpindahan ini penting karena dapat mengubah komposisi penduduk, pola permukiman, serta hubungan antar kelompok baik di Kudus maupun di Semarang.

Eksodus tersebut juga mencerminkan adanya pola migrasi yang tidak sepenuhnya acak, melainkan mengikuti jalur jaringan sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Hubungan kekerabatan, relasi dagang, serta keberadaan organisasi komunitas menjadi faktor yang mempermudah proses perpindahan dan adaptasi di tempat baru. Dalam konteks ini, migrasi bukan hanya perpindahan ruang, tetapi juga perpindahan dalam jaringan sosial yang memungkinkan individu untuk tetap mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain itu, pilihan terhadap Semarang sebagai tujuan utama juga menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki kapasitas sosial dan ekonomi yang lebih siap dalam menerima arus pengungsi. Infrastruktur kota, akses terhadap perdagangan, serta keberadaan komunitas multietnis menjadikan Semarang sebagai ruang yang relatif lebih stabil untuk memulai kembali kehidupan setelah mengalami trauma konflik.

Peristiwa Kudus 1918 juga penting dilihat dari sisi wacana dan memori sosial. Penelitian Carkner itu menunjukkan adanya perubahan sikap redaksi dan perebutan narasi di media berbahasa Melayu setelah kerusuhan, termasuk dorongan untuk membangun pertemuan persahabatan demi mencegah konflik serupa. Artinya dampak konflik tidak berhenti pada pembakaran, penjarahan, dan pengungsian, tetapi berlanjut pada cara masyarakat menafsirkan peristiwa, menetapkan siapa korban dan siapa pelaku, serta menilai peran negara kolonial. Hal ini membuka ruang penelitian untuk menelaah bagaimana konflik komunal membentuk identitas, solidaritas, dan cara kelompok-kelompok sosial menegosiasikan posisi mereka setelah tragedi (Carkner, 2019).

Penelitian mengenai konflik Kudus tahun 1918 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, terutama yang menyoroati aspek pemberitaan media, dinamika politik kolonial, serta relasi antar etnis. Salah satu kajian penting dilakukan oleh Carkner (2019) yang menganalisis bagaimana pers berbahasa Melayu mbingkai peristiwa kerusuhan Kudus, termasuk perdebatan mengenai penyebab konflik dan representasi kelompok etnis dalam wacana publik. Selain itu, penelitian Adam et al. (2019) juga menyoroati posisi komunitas Tionghoa dalam konteks sosial politik di kota-kota besar, termasuk peran media dan organisasi dalam merespons konflik. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis wacana, dinamika politik, atau konteks konflik secara umum, sehingga belum secara spesifik membahas eksodus sebagai respons sosial yang terstruktur akibat kekerasan. Padahal, perpindahan penduduk dalam situasi konflik merupakan fenomena penting yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, tetapi juga dengan strategi adaptasi sosial dan ekonomi.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori konflik sosial dan migrasi sebagai respons terhadap krisis. Dalam perspektif konflik sosial, konflik dipahami sebagai hasil dari akumulasi ketegangan struktural dalam masyarakat, seperti persaingan ekonomi, segregasi sosial, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya. Ketika perbedaan kepentingan tersebut diperkuat oleh identitas etnis dan keagamaan, konflik dapat berkembang menjadi kekerasan terbuka yang melibatkan mobilisasi massa dan legitimasi simbolik (Liliweri, 2018).

Sementara itu, dalam perspektif migrasi, perpindahan penduduk tidak hanya dipahami sebagai proses demografis, tetapi juga sebagai strategi adaptasi terhadap kondisi yang tidak aman. Migrasi dalam konteks konflik sering terjadi sebagai bentuk respons rasional untuk menghindari ancaman kekerasan, sekaligus upaya untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, keberadaan jaringan sosial, akses terhadap peluang ekonomi, serta tingkat keamanan wilayah tujuan menjadi faktor penting dalam menentukan arah migrasi (Côté, 2014).

Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini melihat eksodus etnis Tionghoa dari Kudus ke Semarang sebagai hasil dari interaksi antara konflik struktural dan strategi bertahan hidup. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya pada penyebab konflik, tetapi juga pada bagaimana masyarakat korban merespons situasi krisis melalui mobilitas sosial yang terorganisasi.

Berdasarkan kerangka tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penyebab konflik antar etnis di Kudus tahun 1918, menganalisis proses terjadinya eksodus etnis Tionghoa, serta mengkaji dampak sosial ekonomi dari perpindahan

tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami bagaimana jaringan komunitas berperan dalam memfasilitasi proses pemulihan pascakonflik.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami konflik komunal dalam perspektif historis sebagai pembelajaran bagi masyarakat masa kini. Studi ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana kekerasan tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik, tetapi juga mendorong perubahan demografis, sosial, dan ekonomi yang berdampak jangka Panjang.

Dalam konteks sejarah sosial, konflik komunal seperti yang terjadi di Kudus tahun 1918 tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa kekerasan yang bersifat insidental, tetapi juga sebagai bagian dari proses historis yang lebih luas. Konflik semacam ini sering kali berakar pada struktur sosial yang telah terbentuk dalam jangka panjang, termasuk pola pemukiman yang tersegregasi, pembagian peran ekonomi, serta kebijakan kolonial yang memperkuat perbedaan antar kelompok. Oleh karena itu, analisis terhadap konflik tidak cukup hanya berfokus pada kronologi peristiwa, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi struktural yang melatarbelakanginya.

Selain itu, kajian mengenai konflik etnis di Indonesia pada masa kolonial menunjukkan bahwa ketegangan antar kelompok tidak jarang dipengaruhi oleh konstruksi identitas yang dibentuk melalui kebijakan pemerintah kolonial. Pengelompokan masyarakat ke dalam kategori rasial seperti Eropa, Timur Asing, dan Pribumi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menciptakan hierarki sosial yang memengaruhi akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, interaksi antar kelompok cenderung berlangsung dalam kerangka ketidaksetaraan, sehingga memperbesar potensi munculnya prasangka dan konflik.

Di sisi lain, penting untuk dipahami bahwa konflik tidak selalu berakhir pada kehancuran total suatu komunitas, melainkan dapat memunculkan bentuk-bentuk adaptasi sosial yang baru. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah migrasi atau perpindahan penduduk sebagai respons terhadap krisis. Dalam banyak kasus, migrasi tidak hanya didorong oleh faktor pendorong (push factors) seperti kekerasan dan ketidakamanan, tetapi juga oleh faktor penarik (pull factors) seperti peluang ekonomi, keamanan, serta keberadaan jaringan sosial di wilayah tujuan. Dengan demikian, perpindahan penduduk dapat dilihat sebagai bagian dari strategi bertahan hidup yang rasional dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

Lebih jauh, pendekatan yang mengaitkan konflik dengan migrasi memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dampak jangka panjang dari kekerasan komunal. Eksodus yang terjadi tidak hanya memengaruhi kondisi masyarakat di wilayah asal, tetapi juga membawa implikasi bagi wilayah tujuan, baik dalam bentuk perubahan demografis, dinamika ekonomi, maupun relasi sosial antar kelompok. Dalam konteks ini, Semarang sebagai kota tujuan memiliki peran penting sebagai ruang penerimaan sekaligus ruang adaptasi bagi komunitas Tionghoa yang terdampak konflik di Kudus.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya merekonstruksi peristiwa konflik, tetapi juga menempatkan eksodus sebagai fenomena sosial yang memiliki makna penting dalam memahami hubungan antara konflik, migrasi, dan perubahan sosial dalam masyarakat kolonial. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam kajian sejarah sosial, khususnya dalam melihat bagaimana masyarakat

merespons krisis dan membangun kembali kehidupannya setelah mengalami kekerasan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosiologi karena objek kajiannya adalah peristiwa masa lampau yaitu konflik antar etnis di Kudus tahun 1918 dan dampaknya berupa perpindahan komunitas Tionghoa dari Kudus ke Semarang. Metode sejarah dipakai untuk merekonstruksi kronologi peristiwa secara runtut, menelusuri faktor faktor penyebab, serta menjelaskan dampak sosial ekonomi yang muncul berdasarkan sumber yang dapat diuji keaslian dan kredibilitasnya (Herlina, 2020).

Tahap pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen diarahkan pada penelusuran sumber primer berupa surat kabar sezaman yang memuat informasi tentang kerusuhan Kudus, kondisi keamanan, jumlah korban, kerugian, sikap pemerintah, penangkapan, dinamika pengungsian, serta respons organisasi Tionghoa di Semarang. Beberapa surat kabar yang digunakan antara lain *De Preanger Bode* (21 November 1918), *De Indier* (05, 07, dan 29 November 1918), *Dagblad van Zuid Holland en 's Gravenhage* (08 November 1918), *De Locomotief* (13 November 1918), serta *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie* (01 dan 06 November 1918). Sementara itu studi pustaka digunakan untuk memperoleh konteks historis, kerangka analisis, serta perbandingan interpretasi dari buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas Kudus, relasi antar etnis, Sarekat Islam, kebijakan kolonial, dan sejarah komunitas Tionghoa di Jawa Tengah.

Pada tahap kritik teks peneliti melakukan kritik ekstern untuk memastikan identitas sumber seperti tanggal terbit, rubrik, dan konteks penerbitan, lalu melakukan kritik intern untuk menilai isi berita dengan mempertimbangkan kecenderungan sudut pandang media, tujuan penulisan, dan kemungkinan adanya pembesaran atau pengecilan informasi, sehingga sumber data tidak diterima begitu saja tanpa verifikasi.

Setelah sumber data dianalisis, peneliti melakukan interpretasi dengan menafsirkan fakta-fakta yang telah lolos kritik untuk menyusun hubungan sebab akibat dan menjelaskan mengapa konflik terjadi, bagaimana eskalasinya pada akhir Oktober 1918, mengapa Semarang menjadi tujuan perpindahan, serta bagaimana kondisi pengungsi dan tindakan komunitas Tionghoa di Semarang dalam merespons peristiwa tersebut. Analisis sumber data dilakukan secara kualitatif historis melalui reduksi data, pengelompokan tema, perbandingan antar sumber, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang konsisten. Keabsahan sumber data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai surat kabar dan mengaitkannya dengan rujukan sekunder yang kredibel, serta mencatat perbedaan data seperti angka korban atau kerugian sebagai bagian dari temuan penelitian. Hasil akhir penelitian disusun dalam bentuk historiografi, yaitu penulisan narasi ilmiah yang sistematis mengenai latar peristiwa, kronologi konflik, proses eksodus dari Kudus ke Semarang, dan dampak sosial ekonomi yang mengikutinya.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Konflik antaretnis di Kudus Tahun 1918

Sejarah kerusuhan yang melibatkan komunitas Tionghoa di Indonesia dapat dipahami sebagai rangkaian peristiwa kekerasan komunal yang muncul pada masa dan konteks berbeda. Polanya sering berkaitan dengan ketegangan ekonomi, kebijakan kekuasaan, dan sentimen anti-Tionghoa yang menguat ketika terjadi krisis sosial politik. Karena itu, setiap peristiwa perlu dilihat pada latar waktu dan kondisi setempat, bukan sebagai satu kejadian tunggal yang selalu memiliki sebab yang sama.

Sewaktu masa kolonial VOC, salah satu peristiwa paling awal dan paling berdarah adalah Geger Pacinan atau pembantaian Batavia 1740. Kekerasan berlangsung di Batavia pada Oktober 1740 dan meluas dalam bentuk pogrom terhadap penduduk Tionghoa. Dalam catatan sejarah, peristiwa ini berkaitan dengan ketegangan sosial ekonomi, kebijakan deportasi, dan kecurigaan terhadap komunitas Tionghoa, lalu berujung pada pembunuhan massal dan pembakaran rumah serta usaha milik Tionghoa (Ratri et al., 2025).

Orang Tionghoa mengalami diskriminasi karena sejak masa kolonial mereka sering ditempatkan sebagai kelompok yang dipisahkan dari penduduk lain dalam tata sosial dan tata hukum (Meij, 2009). Pemisahan ini membuat hubungan antar kelompok tidak berkembang setara karena orang Tionghoa dipandang sebagai kelompok yang berbeda dan sering diasosiasikan dengan peran ekonomi tertentu. Akibatnya muncul jarak sosial, prasangka, dan stereotip yang bertahan lama dan mudah muncul kembali ketika terjadi krisis ekonomi atau ketegangan politik.

Diskriminasi itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari melalui pelabelan negatif, pembatasan akses, dan perlakuan tidak adil. Dalam banyak kasus orang Tionghoa dianggap hanya berorientasi pada perdagangan, dianggap lebih dekat dengan kekuasaan, atau dianggap mengambil keuntungan dari masyarakat setempat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Juditha, bahwa stereotip seperti ini membuat orang Tionghoa mudah dijadikan kambing hitam saat terjadi masalah sosial, sehingga konflik bisa berubah menjadi kekerasan komunal dan penjarahan (Juditha, 2015).

Dalam konteks kota dagang seperti di Kudus, diskriminasi juga terkait dengan persaingan ekonomi. Ketika komunitas Tionghoa berkembang dalam jaringan usaha tertentu, sebagian kelompok lain dapat merasa terdesak atau iri, lalu perasaan itu berubah menjadi kebencian kolektif (Dawis, 2013). Jika situasi keamanan lemah dan isu-isu identitas semakin tajam, diskriminasi tidak lagi hanya berupa sikap dan kata-kata, tetapi bisa berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan, tempat tinggal, dan usaha.

Guna memberikan gambaran mengenai sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, berikut hasil analisis yang memuat daftar surat kabar sezaman yang memberitakan peristiwa kerusuhan Kudus tahun 1918 beserta tanggal terbit dan inti pemberitaannya.

Laporan *De Indier* edisi 9 November 1918 menjelaskan bahwa Koedoes dikenal sebagai kota religius dengan komunitas Muslim ortodoks yang sangat sensitif terhadap isu keagamaan. Dalam laporan tersebut, para hadji digambarkan sebagai figur yang dihormati dan memiliki pengaruh sosial yang besar sehingga berpotensi memobilisasi massa, terutama ketika insiden awal dipahami sebagai tindakan yang dianggap menghina simbol-simbol religius. Uraian ini menunjukkan bahwa unsur religius dapat dipakai untuk membangun legitimasi moral atas tindakan kekerasan,

meskipun akar persoalan yang lebih dominan tetap berkaitan dengan persaingan ekonomi dan dinamika politik setempat.

Laporan koran *De Locomotief* edisi 13 November 1918, laporan koresponden tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasca kerusuhan di Kudus tampak seolah mulai normal, tetapi sebenarnya pemulihan itu lebih bersifat semu. Koresponden menekankan bahwa orang-orang kembali berlalu-lalang dan beberapa toko tidak lagi menutup jendela, sehingga orang luar dapat mengira situasi sudah aman, padahal kenyataannya ketegangan sosial masih kuat dan rasa takut masih menguasai masyarakat.

Kutipan itu juga memperjelas bahwa kerusuhan tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memperdalam kebencian antarkelompok. Dari sisi pribumi, kebencian yang dipaparkan muncul karena persaingan yang tajam dalam bisnis rokok kretek yang sebelumnya dikuasai pribumi, lalu sebagian hadji mengalami kebangkrutan sehingga memunculkan rasa iri dan kemarahan. Koresponden juga menambahkan adanya pengalaman pemerasan yang lama dialami orang Jawa miskin, serta kondisi massa yang mudah dipengaruhi oleh segelintir orang, sehingga kemarahan kolektif dapat diarahkan menjadi tindakan kekerasan.

Bisnis kretek saat itu memang menjadi salah satu sektor ekonomi paling penting di Kudus dan menjadi sumber persaingan yang tajam. Kretek tidak hanya memberi keuntungan besar bagi pedagang dan pengusaha, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja dan membentuk jaringan produksi serta distribusi yang luas (Badil, 2011). Persaingan dalam industri kretek juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan skala produksi dan distribusi yang terjadi pada awal abad ke-20. Meningkatnya permintaan pasar mendorong pelaku usaha untuk memperluas jaringan produksi, yang pada akhirnya memperketat kompetisi antarkelompok. Dalam situasi ini, perbedaan akses terhadap modal, jaringan dagang, dan teknologi produksi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Ketika sebagian kelompok mampu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain, kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi ketimpangan yang kemudian diterjemahkan sebagai ketidakadilan berbasis etnis. Dengan demikian, konflik ekonomi yang terjadi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan persepsi sosial yang berkembang di masyarakat..

Sedangkan menurut *De Preanger Bode* edisi 21 November 1918, kerusuhan bermula ketika arak-arakan Tionghoa yang bertujuan melakukan ritual keselamatan melewati wilayah Koedoes Koelon dan terjadi perselisihan antara peserta arak-arakan dengan seorang pengemudi grobak pribumi. Insiden yang pada awalnya bersifat kecil ini kemudian memicu pelemparan batu oleh massa dan berkembang menjadi penyerangan terhadap sejumlah rumah warga Tionghoa. Polisi memang sempat membubarkan kerumunan, namun ketegangan tidak mereda dan justru kembali muncul hingga malam hari.

Sejalan dengan itu, surat kabar *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* juga menggambarkan besarnya skala kekerasan yang terjadi dalam kerusuhan Kudus. Koran ini menyebutkan bahwa jumlah korban luka diperkirakan mencapai sekitar empat ratus orang, sementara jumlah korban tewas secara resmi dilaporkan tidak lebih dari sepuluh orang. Namun, laporan tersebut secara tegas meragukan angka resmi itu dan menekankan bahwa kenyataan di lapangan sangat mungkin jauh

lebih buruk, terutama jika memperhatikan kesaksian anggota korps polisi Semarang yang terlibat langsung dalam penanganan bentrokan.

Kemudian, dalam laporan *Het Nieuws van den Dag* edisi 1 November 1918 disebutkan bahwa bantuan kepolisian dari Semarang yang dipimpin Komisaris Ruempol baru tiba sekitar pukul 11.30 malam setelah kerusuhan membesar. Setibanya di lokasi, polisi terlibat pertempuran sengit untuk memukul mundur massa, lalu melakukan penangkapan terhadap sekitar 60 orang, termasuk seorang tokoh yang disebut sebagai wakil ketua Sarekat Islam setempat. Uraian ini menunjukkan bahwa pemulihan ketertiban sangat bergantung pada intervensi aparat dari kota besar, bukan pada kemampuan keamanan lokal.

Hal ini memperlihatkan bahwa kerusuhan Kudus 1918 tidak hanya dipengaruhi oleh ketegangan sosial ekonomi dan kebencian antarkelompok, tetapi juga diperparah oleh kelemahan negara dalam merespons secara cepat di tingkat lokal. Keterlambatan kedatangan polisi dari Semarang menunjukkan bahwa kapasitas penanganan keamanan di Kudus belum memadai, sehingga pada jam-jam krusial massa memiliki ruang yang luas untuk melakukan pembakaran, penjarahan, dan kekerasan sebelum situasi dapat dikendalikan. Selain itu, laporan tentang banyaknya polisi pribumi yang sakit dan sebagian melarikan diri memperlihatkan rapuhnya struktur keamanan pedalaman, baik karena rendahnya kesiapan personel maupun karena potensi ketidaknetralan aparat dalam menghadapi konflik komunal.

Keterbatasan respons aparat ini juga menunjukkan bahwa sistem keamanan kolonial belum sepenuhnya mampu menjangkau wilayah-wilayah di luar pusat administrasi. Ketimpangan kapasitas antara kota besar dan kota kecil menyebabkan proses penanganan konflik tidak berlangsung merata. Dalam situasi seperti ini, masyarakat lokal sering kali menghadapi konflik tanpa perlindungan yang memadai, sehingga membuka peluang bagi berkembangnya kekerasan kolektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa faktor struktural negara memiliki peran penting dalam menentukan eskalasi konflik, terutama ketika otoritas tidak hadir secara cepat dan efektif pada saat krisis berlangsung.

Kerusuhan Kudus 1918 dalam kajian akademik dipahami sebagai peristiwa yang tidak berhenti pada kekerasan satu malam, melainkan berlanjut pada krisis rasa aman yang mendorong mobilitas penduduk. Setelah 31 Oktober 1918 terjadi pelarian besar-besaran warga Tionghoa dari Kudus ke kota-kota besar, terutama Semarang, dan pemberitaan pers berbahasa Melayu pada minggu-minggu berikutnya ikut membentuk cara publik memahami sebab konflik, pelaku, serta dampak sosialnya (Carkner, 2019).

Proses Eksodus dan Dampak Sosial Ekonomi Perpindahan ke Semarang

Eksodus ke Semarang dalam kerangka ini dapat dibaca sebagai strategi keselamatan dan pemulihan hidup, karena perpindahan dilakukan ketika komunitas korban menilai bahwa perlindungan aparat dan stabilitas sosial di Kudus belum benar-benar pulih. Sehingga mereka memilih kota tujuan yang lebih besar, lebih terhubung, dan memiliki jaringan komunitas yang dapat memberi dukungan. Pola ini sejalan dengan analisis Van Dijk yang menegaskan bahwa pascakerusuhan Kudus 1918, ketakutan akan kekerasan lanjutan dan ketidakpastian perlindungan negara mendorong sekitar separuh komunitas Tionghoa Kudus meninggalkan kota dan mencari perlindungan di Semarang sebagai pusat ekonomi dan administrasi regional yang relatif lebih aman (Van Dijk, 2007). Pandangan ini juga sejalan dengan kajian

Côté yang menyebutkan bahwa dalam sejarah Indonesia, migrasi internal komunitas Tionghoa kerap terjadi sebagai respons terhadap kekerasan dan diskriminasi, di mana kota besar dengan jaringan komunitas yang kuat dipilih sebagai ruang pemulihan sosial dan ekonomi (Côté, 2014). Selain itu, Anthony Reid dalam pembahasannya mengenai kekerasan komunal di Asia Tenggara menekankan bahwa perpindahan penduduk setelah konflik bukan semata akibat kerusakan fisik, tetapi terutama karena runtuhnya rasa aman dan kepercayaan terhadap tatanan sosial lama, sehingga migrasi menjadi pilihan rasional untuk bertahan hidup dan membangun kembali masa depan (Reid, 2011).

Pada saat yang sama, konteks penting adalah bahwa menjelang akhir Oktober 1918 Kudus juga berada dalam suasana wabah influenza yang mematikan, sehingga komunitas Tionghoa melakukan arak-arakan toapekong sebagai praktik spiritual untuk memohon keselamatan, dan konteks sosial budaya ini ikut membentuk rangkaian ketegangan yang kemudian meledak menjadi kekerasan. Setelah ledakan kekerasan terjadi, dampak utamanya tidak hanya kerusakan material, tetapi runtuhnya rasa aman yang berlanjut, dan inilah yang menjelaskan mengapa perpindahan ke Semarang menjadi sangat masuk akal, sebab migrasi dalam situasi konflik biasanya dipilih ke kota yang lebih besar, lebih terhubung, dan memiliki jaringan komunitas yang mampu memberi perlindungan awal serta peluang pemulihan ekonomi (Supratno & Setiawati, 2023).

Selain itu, perpindahan ke Semarang menjadi wajar karena kota besar menyediakan tingkat keamanan yang relatif lebih tinggi, akses transportasi yang lebih baik, dan yang paling penting, ketersediaan jaringan komunitas untuk menampung pengungsi dan memulihkan mata pencaharian. Pemilihan Semarang sebagai tujuan dapat diletakkan pada karakter kota tersebut sebagai pelabuhan dan pusat administrasi yang sejak abad ke 19 terus tumbuh dan menarik penduduk non Eropa, sehingga Semarang menjadi ruang sosial yang dipenuhi kampung-kampung dan komunitas beragam yang bernegosiasi dengan negara kolonial soal tempat tinggal, layanan kota, dan hak hidup layak (Cobban, 1988). Dengan kata lain, Semarang bukan sekadar kota yang dekat, melainkan kota yang infrastrukturnya lebih mapan dan lebih mampu menyerap guncangan demografis, termasuk kedatangan pengungsi dari kota pedalaman seperti Kudus.

Menelisik dari sisi sejarah komunitas Tionghoa di Semarang, sejumlah karya sejarah lokal memperlihatkan bahwa Semarang memiliki basis sosial ekonomi Tionghoa yang kuat, institusi komunitas, serta pengalaman panjang berinteraksi dengan struktur kolonial dan dinamika kota. Riwayat Semarang karya Thian Joe Liem menggambarkan bagaimana komunitas Tionghoa Semarang berkembang dalam jaringan perdagangan, organisasi sosial, dan kehidupan pecinan yang terhubung dengan tata kelola kolonial, sehingga kota ini secara historis memiliki kapasitas sosial untuk mengorganisasi bantuan, menampung pendatang, dan menghubungkan kebutuhan komunitas dengan saluran administrasi (Liem, 1951). Basis komunitas ini berkaitan dengan fakta bahwa pada awal abad ke-20 organisasi pan-Tionghoa seperti Tiong Hoa Hwee Koan telah memainkan peran penting dalam penguatan pendidikan, solidaritas, dan identitas komunitas Tionghoa di Hindia Belanda, sehingga ketika terjadi krisis seperti Kudus 1918, jaringan organisasi dan ruang pertemuan komunitas di kota besar lebih siap menjadi simpul konsolidasi (Suryadinata, 1971). Dalam perspektif ini, eksodus dari Kudus ke Semarang bukan hanya reaksi spontan karena trauma, tetapi juga pergerakan menuju simpul jaringan

sosial yang memungkinkan pemulihan, baik pemulihan fisik melalui tempat berlindung maupun pemulihan ekonomi melalui akses kerja dan perdagangan.

Eksodus tersebut juga dapat dipahami sebagai dampak dari struktur ruang kolonial yang sejak lama memusatkan komunitas Tionghoa pada area tertentu dan mengikat peran ekonomi mereka pada jaringan perantara perdagangan di kota-kota pelabuhan. Penelitian tentang pola spasial kampung Tionghoa di Semarang pada era kolonial menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa tinggal di kawasan pecinan dan lingkungan sekitar yang dibentuk kebijakan kolonial, dan mereka memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi sebagai pedagang perantara, sehingga pecinan Semarang menjadi ruang yang relatif stabil bagi komunitas Tionghoa untuk membangun kembali jaringan hidup ketika terjadi guncangan di kota lain (Dewi et al., 2025).

Hal ini membantu menjelaskan mengapa pengungsi Tionghoa dari Kudus cenderung memilih Semarang, karena secara sosial mereka dapat “masuk” ke jaringan yang sudah ada, dan secara spasial mereka dapat berkumpul di area komunitas yang menyediakan dukungan praktis seperti informasi, perlindungan sosial, serta akses ke pasar dan transportasi. Dengan demikian, konflik di Kudus 1918 menghasilkan eksodus bukan hanya karena skala kekerasan, tetapi karena setelah kekerasan muncul penilaian bahwa masa depan di Kudus menjadi terlalu berisiko, sementara Semarang menawarkan kombinasi keamanan, jejaring komunitas, dan peluang ekonomi yang lebih realistis untuk membangun ulang kehidupan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksodus etnis Tionghoa dari Kudus ke Semarang pada tahun 1918 merupakan hasil dari dinamika konflik sosial yang kompleks dan berlapis. Konflik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi ketegangan yang berkembang dalam struktur sosial ekonomi masyarakat kolonial. Persaingan dalam sektor perdagangan dan industri lokal, khususnya industri kretek, mempertemukan berbagai kelompok dalam ruang ekonomi yang sama dan memunculkan kecemburuan sosial. Ketika persaingan tersebut diperkuat oleh identitas etnis dan agama, konflik menjadi lebih mudah tersulut dan berkembang menjadi kekerasan terbuka yang melibatkan mobilisasi massa dalam skala luas.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa unsur identitas memiliki peran penting dalam mempercepat eskalasi konflik. Dalam masyarakat yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap simbol keagamaan dan etnis, insiden yang menyentuh aspek simbolik dapat dengan cepat memobilisasi emosi kolektif. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan aparat keamanan dalam merespons konflik pada tahap awal, sehingga kekerasan meluas sebelum dapat dikendalikan secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas pengendalian konflik serta keterlambatan intervensi aparat turut berkontribusi terhadap besarnya dampak sosial yang ditimbulkan oleh kerusuhan.

Lebih lanjut, eksodus ke Semarang tidak hanya dipahami sebagai dampak langsung dari kerusuhan, tetapi juga sebagai strategi adaptif masyarakat korban dalam menghadapi ketidakamanan dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Keputusan untuk berpindah didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti tingkat keamanan yang lebih tinggi, ketersediaan jaringan komunitas, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks ini, keberadaan komunitas Tionghoa di

Semarang menjadi faktor penting yang memungkinkan proses adaptasi berlangsung lebih cepat melalui dukungan sosial, akses terhadap pekerjaan, serta peluang untuk membangun kembali kehidupan yang terdampak konflik.

Selain itu, eksodus tersebut juga membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial ekonomi di wilayah asal maupun tujuan. Di Kudus, perpindahan sebagian besar komunitas Tionghoa berdampak pada terganggunya jaringan perdagangan dan perubahan komposisi sosial masyarakat. Sementara itu, di Semarang, kedatangan pengungsi turut memperkuat dinamika komunitas Tionghoa sekaligus menambah kompleksitas sosial di wilayah perkotaan. Dengan demikian, perpindahan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan proses kolektif yang memengaruhi struktur sosial secara lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konflik komunal tidak hanya menghasilkan kerusakan fisik, tetapi juga mendorong perubahan demografis, sosial, dan ekonomi yang berdampak jangka panjang. Eksodus yang terjadi menunjukkan bahwa mobilitas penduduk merupakan bagian dari strategi bertahan hidup, sekaligus memperlihatkan pentingnya jaringan sosial dalam menopang proses pemulihan masyarakat serta dalam membentuk kembali kehidupan sosial dan ekonomi pascakonflik.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ufi Saraswati selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan yang diberikan selama proses penyusunan tulisan ini. Saya juga mengapresiasi perhatian dan motivasi yang senantiasa diberikan oleh Ibu Ufi, sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan lebih terarah dan sistematis. Segala saran dan kritik yang diberikan menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas dan kedalaman pembahasan tulisan ini.

Referensi

- Adam, A. W., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., Gayatri, I. H., Sinaga, L. C., & Rozi, S. (2019). *Tionghoa dan ke-Indonesia-an: Komunitas Tionghoa di Semarang dan Medan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badil, R. (2011). *Kretek Jawa: Gaya hidup lintas budaya*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Carkner, D. (2019). *Racial and Economic Influences in the Malay-Language Press Coverage of the Anti-Chinese Riot in 1918, Kudus, Java*. Thesis. University of British Columbia.
- Cobban, J. L. (1988). Kampung and conflict in colonial Semarang. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(2), 266–291. <https://doi.org/10.1017/S0022463400000564>.
- Côté, I. (2014). Internal migration and the politics of place: A comparative analysis of China and Indonesia. *Asian Ethnicity*, 15(1), 111–129. <https://doi.org/10.1080/14631369.2013.830365>.
- Dawis, A. (2013). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Gramedia Pustaka Utama.

- Dewi, K. E. S., d'Auria, V., & De Meulder, B. (2025). Chinese inner-city kampung's spatial pattern transformation in colonial and post-colonial Semarang. *Journal of Chinese Architecture and Urbanism*, 8(1), 8314. <https://doi.org/10.36922/jcau.8314>.
- De Indier. (1918, November 5). *Berita situasi keamanan pasca kerusuhan Kudus dan Demak serta penangkapan tokoh terkait*. Semarang.
- De Indier. (1918, November 7). *Tulisan polemik Insulinde dan tudingan terhadap Sarekat Islam pasca kerusuhan Kudus*. Semarang.
- De Indier. (1918, November 9). *Ulasan faktor sosial religius dan persaingan sebagai latar kerusuhan Kudus*. Semarang.
- De Locomotief. (1918, November 13). *Laporan koresponden tentang kondisi Kudus pasca kerusuhan dan ketegangan yang belum pulih*. Semarang.
- De Preanger Bode. (1918, November 21). *Berita rapat perkumpulan Tionghoa di Semarang membahas perkara Kudus*. Bandung.
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië. (1918, November 1). *Laporan awal kerusuhan Kudus dan kedatangan bantuan dari Semarang*. Batavia.
- Hana, M. Y. (2018). Dinamika sosio-ekonomi pedagang santri dalam mengembangkan industri Kretek di Kudus, 1912-1930. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(1), 15–35. <https://doi.org/10.30829/j.v2i1.1420>.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 87-104. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.445>.
- Liem, T. J. (1951). *Riwayat Semarang*. Boekhandel Ho Kim Yoe.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka, konflik, dan komunikasi antarbudaya*. Prenada Media.
- Mahmudah, I. (2018). Perkembangan kota Sumenep pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1883-1926. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6(3), 1-11. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/25784>.
- Meij, L. S. (2009). *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ratri, R. Y., Rohimah, A. F., Chotimah, N., Nurviani, R., & Putri, S. D. (2025). Jejak yang Terlupakan: Keraton Kartasura dalam Perspektif Politik Identitas dan Memori Kolektif Masyarakat. *Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture*, 1(3), 192–202. <https://abdurraufinstitute.org/journal.abdurraufinstitute.org/index.php/dampeng/article/view/415>.
- Reid, A. (2011). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sin, S. K. (2005). Etnis Tionghoa Kristen Paska Kerusuhan Mei 1998. *Jurnal Teologi Aletheia*, 8(15), 45–98.

- Supratno, E., & Setiawati, N. A. (2023). Cornelis van Proosdij and Loekmono Hadi: History of Leaders of Kudus Hospital. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(1), 118-128. <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.36538>.
- Suryadinata, L. (1971). Pre-war Indonesian nationalism and the Peranakan Chinese. *Indonesia*, 11, 83–94. <https://doi.org/10.2307/3350745>.
- Van Dijk, K. (2007). *The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918*. Brill.